

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Terkait Otonomi Daerah di Indonesia.....	16
B. Konsep Terkait Desentralisasi Fiskal	24
C. Konsep Terkait Pajak	29
D. Konsep Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian	41
B. Bahan Penelitian	44
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	47

D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	48
E. Jalannya Penelitian	49
F. Analisis Hasil Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo	52
1. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terkait dengan Otonomi Daerah	52
a) Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Kemerdekaan Indonesia	63
b) Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956	67
c) Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999	70
d) Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	77
2. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pelaksanaan Otonomi di Daerah Kabupaten Sleman	82
a) Gambaran Umum Kabupaten Sleman	82
b) Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman <i>Pasca</i> Pengalihan PBB-P2	85
c) Hambatan dalam Pengelolaan PBB-P2 terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman	97
3. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pelaksanaan Otonomi di Daerah Kabupaten Kulon Progo	99
a) Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo	99
b) Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo <i>Pasca</i> Pengalihan PBB-P2	101

c) Hambatan dalam Pengelolaan PBB-P2 terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo ...	108
4. Perbandingan Pelaksanaan Otonomi Daerah Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo <i>Pasca</i> Pengalihan PBB-P2	111
B. Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dalam UUPDRD serta Kaitannya dengan Konsep Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah	114
1. Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009	114
2. PBB-P2 sebagai Bagian dari Pajak Daerah dan Hubungannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah	117
3. Implikasi Pengaturan Pengalihan PBB-P2 dalam UUPDRD dan Kaitannya dengan Konsep Desentralisasi Fiskal	127
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	147